

TAJUK RENCANA

Pil Pahit, Menaikkan Harga BBM

AKHIRNYA, harga BBM naik! Kabar ‘tidak menyenangkan’ yang disampaikan Presiden Jokowi, Sabtu (3/9) siang itu terasa mengejutkan. Setelah dua hari masyarakat ‘merasa tenang’ harga BBM tidak naik. Tiba-tiba tanpa sinyal, Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter, solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamina menjadi Rp 14.500 per liter.

Orang pun bertanya, apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasinya? Dan apakah pengumuman itu tepat momentumnya?

Sebelum pengumuman ini, sejatinya Presiden Jokowi atau Menkeu Sri Mulyani sudah berkali-kali menjelaskan soal keuangan negara yang sudah payah menanggung beban besar subsidi BBM. Sementara juga ada belanja subsidi energi, khususnya BBM, dalam APBN 2022 melonjak dari semula hanya Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka subsidi energi itu bisa melesat di atas Rp 690 triliun kalau tidak ada langkah konkret mengurangi besarnya atau membatasi pemakaiannya. Sehingga meski terasa berat, menaikkan harga BBM tidak bisa dielakkan. Kenaikan harga BBM ibarat sebuah pil pahit yang harus digunakan.

Langkah antisipasi juga telah disampaikan Presiden. Ada sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Misal pemberian BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Masyarakat penerima akan mendapatkan BLT Rp 150 ribu selama 4 bulan. Menganggarkan subsidi upah Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta / bulan senilai Rp 600 ribu. Juga pemda diminta menggunakan 2% dana transfer Rp 2,17 triliun untuk bantuan ang-

kutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. (KR, 4/9)

Langkah antisipasi tersebut menarik. Karena sebelumnya Presiden menjelaskan dan mengakui bahwa subsidi BBM selama ini cenderung dinikmati kalangan mampu. iDan lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, kata Presiden.

Kalimat ini menegaskan, Presiden paham ada ‘mis-management’ di lapangan. Dengan kata lain, selama ini yang terjadi dan dilaksanakan sistemnya tidak pas serta dengan pengawasan yang tidak efektif. Apa yang dikemukakan presiden sekaligus menegaskan, dalam pemberian subsidi BBM di lapangan, ada hak rakyat kecil yang terampas.

Sejatinya, inilah persoalan krusial yang harus diurai agar bantuan tidak salah sasaran serta beban utang negara tidak semakin menggunung. Sebagai mana diakui Presiden, perlunya ada perbaikan sistem agar tepat sasaran. Subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara sudah selayaknya dipangkas.

Mirisnya realita bantuan untuk orang miskin, yang terjadi di lapangan. Tak heran di tengah kesulitan rakyat yang baru akan bangkit pascapandemi, kebijakan menaikkan harga BBM tetap dinilai kurang bijak. Bahkan bisa dikatakan kurang populis, tidak pro-rakyat. Apalagi sejak maju-mundurnya keputusan menaikkan harga BBM ini, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Dan kepastian ini memungkinkan harga-harga akan naik lagi. Semua kian menyulitkan rakyat untuk bangkit. Jadi bagaimana ‘bangkit bersama, bangkit lebih kuat’ kalau fondasinya terbongkar lagi? □

Maklumat 5 September, Menakjubkan

PERISTIWA yang terjadi pada 5 September 1945 memiliki nilai historis bagi Bangsa Indonesia. Peristiwa yang dikenal sebagai Maklumat 5 September tersebut mempunyai dampak luar bisa bagi tetap tegaknya Republik Indonesia. Semua ini tidak terlepas dari hasil pemikiran yang sangat luar biasa dari Sri Sultan HB IX. Mengapa demikian?

Teks proklamasi kemerdekaan RI dibacakan Soekarno didampingi oleh Moh Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah membacakan teks proklamasi, Soekarno menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sudah merdeka. Gema proklamasi dengan cepat menyebar ke masyarakat dan ke seluruh penjuru dunia.

Sidang Istimewa

Tokoh pertama yang mengucapkan selamat atas terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dari Yogyakarta. Ucapan selamat ini disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan 19 Agustus, Sri Sultan dan Paku Alam mengadakan siding istimewa di Gedung Sanabudaya

Sidang tersebut antara lain memutuskan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tunduk pada perintah dari Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di belakang kepemimpinan mereka berdua. Pernyataan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kemudian terkenal dengan nama Maklumat 5 September.

Dalam maklumat ditulis : *!Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan, bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan*

A Kardiyat Wiharyanto

adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu berhubungan dengan keadaan dewasa ini, segala urusan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di ta-



KRI-OKO SANTOSO

ngan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.

Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Sementara, isi maklumat atau amanat dari Sri Paku Alam VIII sama dengan yang dikeluarkan oleh Sultan.

Menanggapi surat dan amanat Sri Sultan dan Sri Paku Alam ini Presiden Republik Indonesia mengirim utusan khusus yang terdiri dari Menteri Negara Mr Sartono dan Menteri Keuangan Mr

Menjaga Marwah Pendidikan

PUBLIK belum lama ini digegerkan dengan tindak operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Karomani. Guru besar tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Kabar-nya, ia berhasil mengumpulkan suap hingga miliaran rupiah.

Kasus Rektor Unila ini bukanlah satu-satunya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dalam hitungan 10 tahun terakhir, dari 2006 sampai 2016, tercatat 36 kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi. Besaran data tersebut menunjukkan betapa mirisnya wajah pendidikan bangsa ini

Fenomena korupsi di perguruan tinggi tidak hanya dalam bentuk suap-menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jual-beli jabatan struktural disebut-sebut kerap terjadi dalam dunia kampus kita hari ini. Belum lagi kasus korupsi pungutan liar, korupsi dana beasiswa, monetisasi publikasi jurnal, joki tugas akhir dan lain sebagainya.

Tamparan

Kasus korupsi di atas memberikan tamparan yang keras kepada wajah pendidikan kita. Marwah kampus sebagai penjaga moralitas bangsa pun hilang. Semula, kampus dipercaya sebagai candradimuka pembentukan intelektual dan karakter anak bangsa. Kini, kepercayaan tersebut memudar lantaran maraknya praktik korupsi yang menggurita di dalamnya.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi massifnya tindak korupsi di dunia kampus. Pertama, hilangnya integritas. Idealnya, orang yang berilmu dapat terhinder dari perbuatan tercela. Ilmu ibarat cahaya harusnya menjadi petunjuk bagi pemilikinya. Dengan ilmu, manusia bisa membedakan hak dan batil, baik dan bu-

Rahmat Hidayat

ruk. Dengan ilmu, integritas manusia itu dibentuk. Sayangnya, idealita tersebut bersebrangan dengan kasus di atas.

Mengafirmasi pernyataan Saifur Rohman (Kompas, 26/8) yang menyebut, tingginya pencapaian akademik seseorang tidak menjamin kualitas integritas dirinya. Kesenjangan ini terjadi disebabkan orientasi materialistik dalam pendidikan kita. Perguruan tinggi hanya menjadi pabrik yang bertugas mempersiapkan *ouput*, yang dibutuhkan oleh pasar. Logika pasar ini menjadikan dunia pendidikan kita kering dari nilai-nilai moral.

Kedua adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampus. Kita jarang menemukan perguruan tinggi yang melakukan update informasi mengenai penerimaan dana masuk, penggunaan uang, dan program yang dijalankan. Hal ini menjadikan dana kampus rentan disalahgunakan secara milik perorangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Website kampus sejatinya perlu menyediakan kolom khusus mengenai laporan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika. Sebab, kampus merupakan lembaga publik, bukan milik perorangan atau sekelompok orang.

Ketiga, proses pemilihan rektor berserta deputinya yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Mengingat, kedudukan rektor sangatlah prestise baik secara sosial dan ekonomi. Tidak heran, apabila pertimbangan akademik bukanlah satu-satunya pertimbangan yang menentukan seseorang layak

Maramis. Melalui utusan ini, Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan penguasa Yogyakarta ini.

Dikuasai Jepang

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat. Pada bulan September itu pula masyarakat Yogyakarta melakukan perebutan kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta. Para pegawai instansi pemerintah yang perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi pemogokan. Mereka memaksa agar Jepang menyerahkan semua kantor mereka kepada Indonesia. Keesokan harinya Komite Nasional Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di Yogyakarta sepenuhnya berada di tangan pemerintah Republik Indonesia.

Tiba-tiba tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Jakarta terancam. Presiden dan Wakil Presiden RI hijrah ke Yogyakarta. Sejak itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat perjuangan untuk mempertahankan RI. Akhirnya, dari Yogyakarta pulalah penjajah meninggalkan Indonesia.

Maklumat 5 September meyakinkan pemerintah pusat bahwa Yogyakarta bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup RI. Itulah yang menjadikan Yogya istimewa. Semua tidak lepas dari sikap heroik dan menakjubkan, Sri Sultan. □

**) A Kardiyat Wiharyanto, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis

Kawasan Borobudur ‘Megah’

KAWASAN Borobudur sekarang sangat indah. Bahkan dari Simpangtiga Palbapang (bila dari arah Yogya ke kiri) ada dipasang lampu-lampu baru, yang jaraknya sangat dekat. Hanya memang tidak sepanjang jalan tersebut hingga ke Candi Mendut ñ Borobudur yang dipasanglah lampu dengan model indah pula. Namun menarik dan jadi makin berderang mestinya kalau malam hari.

Di Borobudur pun demikian. Pemasangan lampu di luar pagar Taman Wista dibuat sangat dekat jaraknya. Sehingga rasanya jalan di Borobudur menjadi megah dan indah dan malam hari tentu akan sangat indah. Apalagi mungkin kalau di

trotoar itu dilengkapi kursi santai seperti di Malioboro. Mungkin suasana Borobudur malam akan hidup, dan mungkin kehidupan malam akan muncul di wilayah Borubudur. Jika ini terjadi, tentu menambah keindahan dan kemegahan Kawasan Borobudur. Hebat ya? Lampu berjejer indah yang membawa kawasan tersebut benderang di malam hari dengan rapat. Mungkin kalau ada spot lampu dari bawah ayang membuat Candi Borobudur juga tampak dari luar, tentu sangat luar biasa. Ayo Taman Wisata, setelah memasang lampu di trotoar seperti sekarang, perlu ada sinar ke atas yang membuat candi Borobudur tampak.

Edi, xxxxxxxxxxxx65

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasehat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP